

SINERGITAS STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA

PANTAI PURWAHAMBA INDAH KABUPATEN TEGAL

Putri Rosiana Dewi, Ida Hayu Dwimawanti, Titik Djumiarti

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof Soedarto, SH Tembalang Semarang Kontak Pos 51269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

To realize successful tourism development requires synergy between the stakeholders involved. Likewise in the development of tourist objects Purwahamba Indah Beach which is located in Tegal Regency. Stakeholders for the development of the Purwahamba Indah Beach tourism object are the Tegal Regency Disporapar, PT BPK, and Pokdarwis Pesona Bahari. The success of the synergy between stakeholders can be seen through the communication and coordination of tourism activities. The purpose of this study is to describe and analyze the success of stakeholder synergy and the factors that hinder the realization of stakeholder synergy in the development of Purwahamba Indah Beach tourism objects. The method used in this research is descriptive qualitative method. The results of the study show that stakeholders in the development of Purwahamba Indah Beach attractions have not yet synergized. Communication and coordination between stakeholders is not optimal. Stakeholders have not carried out their roles properly as stated in the Regional Regulation of Tegal Regency No. 7 of 2018. Disporapar involvement is still not optimal. The unrealized hopes of developing Purwahamba Indah Beach with the conditions on the ground led to a decline in trust between stakeholders involved in the development of Purwahamba Indah Beach. Disporapar's responses tend to be less good at dealing with infrastructure problems that have decreased feasibility and lack of maintenance has an impact on direct relationships and weakened stakeholder participation. To encourage the realization of synergy between stakeholders, a special evaluation is needed to increase professionalism between stakeholders in the development of the Purwahamba Indah Beach tourist attraction, Tegal Regency.

Keywords: *Synergi, Communication, Coordination, Development of Tourism*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor unggulan dan masuk ke dalam tiga besar sektor penyumbang devisa negara yang didorong oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sebagai negara kepulauan, potensi Indonesia untuk mengembangkan industri pariwisata sangatlah besar. Sejalan dengan regulasi

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, menyebutkan bahwa pariwisata bersifat multidimensi sebagai kebutuhan setiap orang dan negara serta sebagai perwujudan antara pemerintah, pemerintah daerah, swasta, wisatawan, dan masyarakat setempat.

Indonesia sebagai negara kepulauan, juga termasuk ke dalam negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia

setelah Kanada (World Population Review, 2019). Garis pantai adalah garis yang memanjang di pesisir laut dan adalah perbatasan antara daratan dan lautan sehingga Indonesia memiliki beragam jenis wisata pesisir, salah satunya yaitu Pantai Purwahamba Indah. Pantai Purwahamba Indah atau biasa disebut Pantai Pur'in menjadi salah satu objek wisata potensial yang terletak di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Letaknya yang strategis berada di jalur utama Brebes – Tegal – Pemalang menjadi poin plus karena kemudahan aksesnya.

Pengelolaan dan pengembangan Pantai Pur'in berada di bawah naungan pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporapar). Disporapar bekerja sama dengan sektor swasta melalui PT Bintang Permata Kharisma atau sering disebut dengan PT BPK serta masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Purwahamba. Hal tersebut sejalan dengan regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2025 disebutkan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Tegal dilaksanakan dalam bentuk skema kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dalam pengembangan objek wisata Pantai Pur'in

harus saling bersinergi semua *stakeholder*-nya baik pemerintah, swasta dan masyarakat.

Namun melihat kondisi di lapangan, pengembangan objek wisata Pantai Pur'in tidak sejalan dengan peran dan fungsi masing-masing *stakeholder*. Di tengah tingginya persaingan sektor pariwisata yang gencar mempromosikan dan menggerakkan sektor pariwisata miliknya, Pantai Pur'in justru mengalami stagnasi dalam pengembangannya. Permasalahan pertama yang terjadi, yaitu tidak terealisasinya pengembangan pariwisata berdasarkan regulasi Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Tegal.

Fasilitas dalam Pantai Pur'in ini justru berada dalam kondisi stagnan atau tidak adanya inovasi ke arah yang lebih baik dan cenderung monoton. Tidak adanya pembangunan fasilitas baru berdampak pada menurunnya daya tarik wisata tersebut. Apabila dibandingkan antara pengunjung wisatawan Pantai Pur'in dengan pengunjung objek wisata lain di Kabupaten Tegal terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Selain itu, adanya keterbatasan promosi objek wisata Pantai Pur'in baik melalui media sosial maupun media cetak. Padahal dewasa ini, platform media sosial sebagai platform media promosi wisata yang sangat menjanjikan.

Terobosan promosi ini harusnya digencarkan oleh seluruh *stakeholder* untuk meningkatkan jumlah wisatawan. Menilik kondisi tersebut maka permasalahan kedua yang terjadi, yaitu adanya ketimpangan keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Tegal.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayattuloh, dkk., pada tahun 2020, mengatakan bahwa kurangnya keterlibatan baik dari pemerintah daerah, masyarakat, serta sektor swasta dalam mengembangkan potensi Pantai Purwahamba Indah (Hidayattuloh et al., 2020). Melalui penelitian tersebut, permasalahan ketiga yang terjadi, yaitu hubungan antara *stakeholder* yang terlibat belum maksimal sehingga mengakibatkan stagnasi pengembangan objek wisata Pantai Pur'in. Padahal kerja sama dan sinergitas yang optimal antar *stakeholder* yang terlibat akan mendorong keberhasilan pengembangan Pantai Pur'in jauh lebih baik. Apabila sinergitas antar *stakeholder* terlaksana dengan optimal, dapat mencapai keberhasilan pengembangan Pantai Pur'in. Berdasarkan pemaparan berbagai permasalahan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk meneliti sinergitas *stakeholder* yang meliputi Disporapar Kabupaten Tegal, PT BPK, serta masyarakat menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Administrasi publik, menurut Chandler dan Plano (dalam Astuti et al., 2020 : 20) adalah proses sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Seiring berjalannya waktu, konsep administrasi publik mengalami pergeseran paradigma. Adapun pergeseran paradigma administrasi publik menurut Nicolas Henry (dalam Astuti et al., 2020 : 22) yaitu paradigma pertama *The Politics – Administration Dichotomy* (1900 – 1926), paradigma kedua *The Principles of Administration* (1927 – 1937), paradigma ketiga *Public Administration as Political Science* (1950 – 1970), paradigma keempat *Public Administration as Management* (1956 – 1970), paradigma kelima *Public Administration as Public Administration* (1970 – sekarang), paradigma keenam *Governance* (1990 – sekarang).

B. Governance

Menurut Roderick Arthur W. Rhodes (dalam Astuti et al., 2020 : 32) mengatakan bahwa definisi *governance* adalah perubahan suatu tata kelola pemerintahan yang memiliki lingkup lebih luas meliputi terbentuknya suatu pengaturan proses yang baru, kaidah pengaturan yang mengalami perubahan menyesuaikan kondisi, serta

munculnya sebuah metode baru untuk mengatur masyarakat, sedangkan menurut UNDP (dalam Aksa, 2018 : 130) *governance* adalah pengimplementasian kegiatan pemerintahan dari tingkat pusat sampai ke tingkat desa seperti wewenang politik, administrasi, dan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat dibutuhkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Pelaksanaan *good governance* melibatkan 3 aktor penting yang harus saling bersinergi yaitu negara (*state*), masyarakat, dan sektor swasta (*private sector*). Dengan demikian, pemerintah bukan lagi pilar tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun fasilitator yang membutuhkan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* untuk saling melengkapi keterbatasan yang ada.

C. Kolaborasi

Kolaborasi menurut Saleh (2021:5) adalah suatu pola dan bentuk hubungan yang dilakukan antar individu atau kelompok yang terlibat untuk saling berbagi informasi, berpartisipasi penuh, mencapai kesepakatan, dan kegiatan pengambilan keputusan untuk mencapai keputusan bersama. Definisi kolaborasi menurut Sarundajang (dalam Azhari, 2017 : 128) adalah suatu proses mendasar yang terbentuk dari kerja sama dan kemudian

menghasilkan kepercayaan, sinergi, dan terobosan melalui pencapaian, kepemilikan dan keterpaduan atau kesinergian antar semua aspek organisasi yang terlibat. Untuk membangun kolaborasi dibutuhkan suatu sinergitas *stakeholder* yang terlibat dan kepercayaan dari *stakeholder* untuk melaksanakan peran dan tanggung jawabnya. Untuk membangun sebuah sinergitas maka dibutuhkan hubungan timbal balik antara kepercayaan dan kolaborasi atau kerjasama *stakeholder*.

Kolaborasi merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan berbagai pihak yang berorientasi pada terciptanya kepercayaan, partisipasi atau keterlibatan, dan sinergitas. Dalam pelaksanaan sebuah kebijakan atau program, dibutuhkan kepercayaan dari semua pihak atau *stakeholder* yang terlibat baik pemerintah, sektor privat (swasta), maupun masyarakat. Kepercayaan menjadi salah satu hal yang krusial untuk membangun kolaborasi yang baik. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, kepercayaan juga berkaitan dengan sinergitas. Kepercayaan yang dibangun secara baik juga dibutuhkan untuk membangun sinergitas antar *stakeholder* dalam pelaksanaan program.

D. Sinergitas

Sinergitas memiliki hubungan erat dengan kolaborasi untuk mencapai keterpaduan berbagai *stakeholder* yang terlibat. Kata sinergitas berasal dari kata

sinergi yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti kegiatan gabungan. Menurut Richard L. Draft (dalam Manggalou, 2022 : 579) sinergitas adalah interaksi yang dilakukan beberapa bagian dalam suatu organisasi untuk menciptakan dampak yang lebih besar dari sekadar individualitas. Menurut Stephen Covey (2004 : 49) dalam bukunya yang berjudul *The Seven Habits of Highly Effective People*, sinergitas adalah proses saling melengkapi antar pihak yang terlibat terhadap perbedaan-perbedaan yang ada untuk mencapai output yang lebih besar. Sedangkan definisi sinergitas menurut Najiyati dan Rahmat (dalam Irdiyanti & Pangestuti, 2020 : 3) yaitu diartikan sebagai perpaduan unsur atau bagian untuk menghasilkan output yang lebih baik dan lebih besar.

Sinergitas *stakeholder* menjadi alternatif yang mendasari terwujudnya implementasi program pemerintah. Sinergitas membutuhkan integrasi semua fungsi organisasi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan yang bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan program/kegiatan. Untuk mengintegrasikan kegiatan dalam mencapai kesinergian *stakeholder*, dibutuhkan interaksi masing-masing aktor yang terlibat yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat sesuai dengan perannya (Irdiyanti & Pangestuti, 2020 : 3).

Rakamdani (2019 : 2) juga menyebutkan bahwa sinergitas adalah proses interaksi masing-masing aktor dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya melalui komunikasi serta koordinasi untuk menciptakan hasil yang lebih optimal. Untuk mengukur terwujudnya sinergitas *stakeholder*, dikaji menggunakan kriteria menurut Najiyati dan Rahmat (dalam Rakamdani, 2019) sebagai berikut:

1. Komunikasi

Devito (2016 : 89) menjelaskan bahwa bentuk komunikasi terdiri dari komunikasi vertikal (komunikasi ke atas/komunikasi ke bawah) dan komunikasi horizontal atau komunikasi setara. Menurut teori Laswell dan Pratminingsih (dalam Laksono, 2018 : 5), terdapat 5 unsur untuk membangun sebuah komunikasi yang efektif, yaitu sebagai berikut:

- a. *Source* atau sumber informasi
Source adalah komunikator atau yang pihak yang menyampaikan pesan. Komunikator meliputi individu, kelompok, organisasi, instansi, dll.
- b. *Encoding*
Encoding adalah proses menerjemahkan dan memahami simbol-simbol dari pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan.
- c. *Media*
Media sebagai alat yang digunakan komunikator untuk menyampaikan

pesan kepada penerima. Media dapat berupa surat, telepon, workshop, rapat, platform meeting online.

d. *Feedback* atau respon

Feedback adalah respon dari penerima pesan yang diberikan kepada pengirim pesan. *Feedback* dapat berupa persetujuan (pro) atau tidak setuju (kontra) terhadap informasi yang telah diterima.

e. *Noise* atau hambatan

Noise adalah hal-hal yang dapat menghambat berjalannya komunikasi. Bentuk hambatan tersebut dapat berupa verbal, nonverbal, fisik, atau lingkungan.

2. Koordinasi

Komunikasi dan koordinasi seperti 2 sisi koin yang berkaitan erat. Apabila salah satu dari aspek tersebut tidak berjalan dengan baik maka akan berdampak pula pada aspek lainnya yang terhambat. Menurut Moekijat (dalam Rakamdani, 2019 : 6) terdapat 8 (delapan) aspek yang dapat mewujudkan koordinasi lebih efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Hubungan langsung

Hubungan langsung berkaitan dengan interaksi interpersonal secara langsung yang mendorong tercapainya koordinasi. Hubungan langsung interpersonal diartikan sebagai hubungan kerja melalui interaksi antar stakeholder yang

bertujuan untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi.

2. Kontinuitas

Kontinuitas didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara terus menerus atau berkelanjutan dan berlangsung setiap waktu dari tahap satu ke tahap lainnya, seperti halnya tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi.

3. Dinamis

Dinamis yang dimaksudkan, yaitu perubahan konstan yang mempertimbangkan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.

4. Tujuan yang jelas

Koordinasi membutuhkan tujuan yang jelas yang menjadi sasaran keberhasilan. Moekijat (dalam Rakamdani, 2019:6) tujuan yang jelas juga terlihat dari penetapan tujuan dan pelaksanaan tujuan.

5. Organisasi yang sederhana

Koordinasi yang efektif, dapat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang sederhana.

6. Perumusan wewenang dan tanggung jawab

Penetapan wewenang dan tanggung jawab yang jelas dapat menegaskan peran stakeholder yang terlibat untuk menciptakan keteraturan dan mengurangi risiko timbulnya konflik atau pertentangan antar *stakeholder*.

7. Komunikasi efektif

Komunikasi dan koordinasi sangat berkaitan erat, sehingga untuk menciptakan koordinasi yang efektif maka diperlukan komunikasi yang efektif.

8. Kepemimpinan supervisi yang efektif

Kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas bawahan yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawabnya.

E. Pengembangan Pariwisata

Yoeti (dalam Rakamdani, 2019 : 7) memaknai kata pengembangan merupakan bertambah, sempurna, merata, meluas dan sebagainya. Pengembangan objek wisata didefinisikan sebagai upaya untuk mewujudkan sesuatu untuk menjadi lebih baik dengan berbagai sumber daya dengan tujuan meningkatkan daya tarik wisata dan meningkatkan jumlah wisatawan untuk berkunjung. Upaya untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kepariwisataan, yaitu:

- a. Merealisasikan upaya untuk meningkatkan daya tarik objek wisata baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Mendukung kegiatan pariwisata dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana.

- c. Meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat lokal objek wisata dan bekerja sama dengan pihak swasta.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti, yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dalam penelitian ini karena sesuai dengan fenomena penelitian ini, yaitu berkaitan dengan sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kualitas data dilakukukan melalui uji triangulasi dan uji objektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sinergitas *Stakeholder* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal

1. Komunikasi

Kriteria komunikasi menurut Laswell dan Pratminingsih (dalam Laksono, 2018:5) sebagai berikut:

a. *Source* atau Sumber Informasi

Stakeholder didefinisikan Sjaifudian (dalam Berliandaldo et al., 2021 : 223) adalah suatu individu ataupun kelompok yang memiliki kepentingan, terlibat, atau dipengaruhi baik secara positif maupun negatif dalam suatu kegiatan program pembangunan. Dalam sinergitas pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah ini, stakeholder sangat berperan penting dalam komunikasi untuk saling bertukar informasi.

Stakeholder yang terlibat dalam komunikasi pengembangan Pantai Purwahamba Indah, yaitu Disporapar Kabupaten Tegal melalui staf bidang pariwisata dan UPTD Pengelolaan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah, Pokdarwis Pesona Bahari yang merupakan masyarakat lokal Desa Purwahamba, dan PT Bintang Permata Kharisma sebagai pihak swasta sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018. Bentuk komunikasi yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam komunikasi pengembangan wisata Pantai Purwahamba Indah, yaitu komunikasi vertikal atas-bawah dan bawah-atas untuk menciptakan kesetaraan sinergi antara Disporapar Kabupaten Tegal, Pokdarwis Pesona Bahari, dan PT Bintang Permata Kharisma.

Keterlibatan tiga *stakeholder*, yaitu Disporapar sebagai pemerintah, PT BPK sebagai swasta dan Pokdarwis sebagai

masyarakat senada dengan yang disampaikan UNDP (dalam Aksa, 2018 : 130) bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, melibatkan 3 aktor penting yang harus saling bersinergi, yaitu pemerintah (*government*), masyarakat (*civil society*), dan sektor swasta (*private sector*) sehingga pemerintah bukan lagi pilar tunggal, namun sebagai fasilitator yang membutuhkan kerjasama dengan berbagai *stakeholder* untuk saling melengkapi keterbatasan yang ada.

b. Media

Media dibutuhkan sebagai alat untuk mendukung tercapainya sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah. Menurut Laswell dan Pratminingsih (dalam Laksono, 2018 : 5), media dalam komunikasi sebagai alat untuk membagikan dan bertukar informasi antar komunikator yang terlibat. Media yang baik, yaitu media yang dapat dijangkau oleh semua *stakeholder* tanpa adanya keberatan dari salah satu pihak. Media yang digunakan dalam komunikasi pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah melalui dua cara yaitu komunikasi langsung melalui rapat, diskusi ringan, dan sosialisasi serta komunikasi tidak langsung melalui platform pesan dan telepon *online* melalui Whatsapp yang sudah sesuai dengan kegunaan media menjadi alat untuk menyampaikan informasi untuk

mendukung keberhasilan komunikasi yang mendorong sinergitas *stakeholder* pengembangan Pantai Purwahamba Indah dalam mencapai tujuan.

c. Kepercayaan

Kepercayaan didefinisikan Covey (2004:53) sebagai sesuatu yang benar, baik dari tindakan maupun ucapan dilakukan sesuai dengan harapan yang ada (kredibel). Saling percaya dalam komunikasi berdampak pada *output* yang dihasilkan dalam suatu program. Kepercayaan *stakeholder* dalam komunikasi pengembangan Pantai Purwahamba Indah sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan interaksi yang positif dan baik. Kepercayaan menjadi pondasi dalam mendorong keberhasilan sinergitas.

Kepercayaan *stakeholder* dalam komunikasi pengembangan Pantai Purwahamba Indah masih rendah. Kepercayaan Pokdarwis kepada Disporapar menurun yang disebabkan karena tidak terealisasinya harapan pengembangan Pantai Purwahamba Indah dengan kondisi di lapangan, melalui kondisi sarana prasarana kurang memadai, keterbatasan kegiatan, dan rendahnya promosi wisata. Keterbatasan inovasi kegiatan, membuat Pantai Purwahamba Indah semakin tenggelam di tengah tingginya persaingan wisata pesisir sekitar.

Selain itu, kepercayaan PT BPK terhadap Disporapar juga menurun karena

rendahnya keterlibatan Disporapar dalam promosi kolam renang dan Taman Ria Permai Sosro yang berdampak pada menurunnya anggaran investasi pengembangan Pantai Purwahamba Indah.

d. Keterbukaan

Keterbukaan menurut Sari (2014:21) didefinisikan sebagai suatu kemudahan untuk mendapatkan atau mengakses semua informasi sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah, keterbukaan informasi untuk keberlanjutan pengembangan wisata bertujuan untuk menyampaikan informasi kegiatan kepariwisataan dengan detail dan jelas. Keterbukaan dalam hal ini juga berarti terbuka terhadap saran dan masukan dari *stakeholder* yang terlibat sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi.

Keterbukaan antar *stakeholder* dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah belum terwujud dengan baik Disporapar masih belum terbuka secara transparan terkait ketersediaan dan pengelolaan anggaran untuk pengembangan Pantai Purwahamba Indah secara komprehensif kepada Pokdarwis dan PT BPK, sehingga tidak sesuai dengan peran Disporapar yang tercantum dalam Perda No. 7 Tahun 2018 untuk menjunjung asas keterbukaan. Namun, baik Pokdarwis maupun PT BPK selalu mengomunikasikan urusan yang berkaitan langsung kepada Disporapar terkait dengan permasalahan dan urusan

yang ada di Pantai Purwahamba Indah baik masalah keamanan, kebersihan, dan kegiatan rutin.

2. Koordinasi

Kriteria koordinasi menurut Moekijat (dalam dalam Rakamdani, 2019 : 6) sebagai berikut:

a. Hubungan Interpersonal

Moekijat (dalam Rakamdani, 2019:6) mengemukakan bahwa hubungan langsung berkaitan dengan hubungan pribadi yang dibangun antar *stakeholder* dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan. Dalam upaya pengembangan Pantai Purwahamba Indah, hubungan langsung harus diciptakan antar *stakeholder* yang terlibat untuk mendorong keberhasilan sinergitas *stakeholder* pengembangan Pantai Purwahamba Indah. Hubungan yang dimaksudkan, yaitu hubungan kerja antar *stakeholder* untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan atau program.

Hubungan langsung antar *stakeholder* dalam koordinasi sudah terlaksana namun belum berjalan maksimal. Hubungan interpersonal Disporapar dengan Pokdarwis dan PT BPK sudah berjalan baik sejak berdirinya Pantai Purwahamba Indah menjadi wisata. Namun, hubungan tersebut mulai merenggang seiring menurunnya jumlah wisatawan Pantai Purwahamba Indah karena keterbatasan kegiatan dan promosi wisata yang disebabkan kurangnya

kepedulian Disporapar terhadap pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah dan diperparah pada saat pandemi Covid-19 yang menyebabkan interaksi para *stakeholder* berkurang dan objek wisata mengalami penutupan sementara yang menyebabkan merenggangnya hubungan kerja antara Disporapar dengan PT BPK dan Pokdarwis.

b. Kontinuitas

Kontinuitas dalam koordinasi dimaksudkan mengetahui kebaruan program atau kegiatan yang dilakukan para *stakeholder*. Kontinuitas menurut Moekijat (dalam Rakamdani, 2019:6) didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara berkelanjutan dan berlangsung setiap waktu dari tahap perencanaan sampai evaluasi. Kontinuitas koordinasi dalam pengembangan wisata Pantai Purwahamba Indah diperlukan untuk menciptakan dan menyelaraskan kegiatan, peran dan tanggungjawab *stakeholder*, serta menjaga hubungan langsung tetap baik. Kontinuitas koordinasi yang baik dapat mendorong tercapainya sinergitas antar *stakeholder*.

Kontinuitas koordinasi antar *stakeholder* belum berjalan optimal. Koordinasi hanya dilakukan pada saat ada kegiatan rutin Grebeg 1000 Kelapa Muda. Namun koordinasi terkait kegiatan lain seperti promosi wisata pengembangan Pantai Purwahamba Indah, tidak dilakukan secara rutin yang menyebabkan

keterbatasan promosi. Hal tersebut tidak sejalan dengan Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018 pasal 12 ayat 3 yang mewajibkan Disporapar, PT BPK, dan Pokdarwis memiliki peran mengoordinasikan pemasaran atau promosi wisata secara masif.

c. Tujuan

Tujuan menurut Covey (2004 : 53) didefinisikan sebagai sasaran dari berbagai kepentingan oleh masing-masing *stakeholder* yang terlibat. Adanya kepentingan dan peran yang berbeda dalam pelaksanaan kebijakan data kegiatan, diintegrasikan melalui tujuan yang sama. Setiap *stakeholder* harus memiliki kesamaan tujuan untuk mencapai visi dan misi program. Kesamaan tujuan juga menjadi salah satu strategi untuk mencapai keberhasilan sinergitas. Adapun tujuan yang ditentukan dalam upaya pengembangan Pantai Purwahamba Indah, yaitu untuk menjadikan objek wisata Pantai Purwahamba Indah sebagai wisata primadona daerah pesisir yang mampu bersaing dengan objek wisata lain.

Tujuan awal telah ditetapkan secara jelas, yaitu menjadikan Pantai Purwahamba Indah menjadi primadona pesisir yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018. Namun dalam realisasi tujuan tersebut, terdapat ketidasesuaian antara kondisi yang

diharapkan dengan kondisi yang ada di lapangan. Keterbatasan fasilitas dan kegiatan rutin mendorong promosi wisata menyebabkan menurunnya pengunjung Pantai Purwahamba Indah yang mempengaruhi pendapatan masyarakat lokal yang memiliki mata pencaharian di Pantai Purwahamba Indah.

d. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab

Moekijat (dalam Rakamdani, 2019:7) menjelaskan perumusan wewenang dan tanggung jawab dalam suatu koordinasi diperlukan untuk menciptakan keteraturan dan keterpaduan para *stakeholders* yang terlibat sehingga terhindar dari adanya pertentangan-pertentangan yang dapat memicu konflik. Perumusan wewenang dan tanggung jawab melibatkan semua *stakeholder* tanpa terkecuali sehingga pengambilan keputusan tidak hanya ditangan pemerintah, melainkan semua pihak yang terlibat sesuai dengan kesepakatan. Perumusan wewenang dan tanggung jawab *stakeholder* dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah bermanfaat untuk memudahkan para *stakeholders* untuk melaksanakan peran mereka dengan sasaran mencapai tujuan yang sama.

Perumusan wewenang dan tanggung jawab telah dilaksanakan melalui kesepakatan bersama sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun

2018 yang menjadi pedoman dalam perumusan wewenang dan tanggungjawab. Namun kemampuan *stakeholder* belum maksimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab. Disporapar sebagai fasilitator belum maksimal menjalankan perannya dalam mendukung komunikasi dan koordinasi pengembangan Pantai Purwahamba Indah. Selain itu, masih rendahnya kesadaran Pokdarwis akan kebersihan wisata yang menjadi salah satu peran SAPTA PESONA pengembangan pariwisata Pantai Purwahamba Indah, dan PT BPK mulai berkurang gairahnya untuk bekerja sama dengan Disporapar dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah.

B. Faktor yang Menghambat Sinergitas *Stakeholder* Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal

1. Keterbatasan Sarana

Sarana prasarana menjadi alat penunjang keberhasilan suatu program. Ketersediaan sarana prasarana sebagai modal pemerintah untuk mengimplementasikan program dan kegiatan. Dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah, sarana prasana untuk berkomunikasi sudah dibangun oleh pemerintah berupa kantor sekretariat Pokdarwis untuk menghimpun semua anggota Pokdarwis pada saat sosialisasi, pelatihan, ataupun kegiatan lain.

Namun sarana yang dibangun untuk melaksanakan koordinasi dan komunikasi kurang memadai. Adanya bencana alam rob, membuat kondisi ruang sekretariat dan kantor UPTD mengalami keretakan dan kebocoran atap sehingga menghambat apabila dilaksanakan komunikasi yang mengharuskan untuk bertatap muka. Selain itu, karena orientasi dari pencapaian sinergitas, yaitu keberhasilan output yang maksimal, *output* dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah yaitu sarana dan prasarana objek wisata juga mengalami penurunan kelayakan karena rendahnya pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab semua *stakeholder* yang terlibat. Keterbatasan anggaran dan rendahnya kepedulian Disporapar menyebabkan rendahnya perbaikan dan pembangunan sarana komunikasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana objek wisata.

2. Rendahnya Kepercayaan *Stakeholder*

Kepercayaan antar *stakeholder* dalam menciptakan suatu kesinergian sangat penting. Hal tersebut sesuai dengan konsep dari Covey (2004 : 53) yang menyebutkan salah satu strategi untuk mencapai kesinergian aktor, yaitu melalui kepercayaan. Dalam sinergitas *stakeholder* pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah, hasil penelitian menemukan bahwa masih rendahnya kepercayaan Pokdarwis dan swasta

terhadap pemerintah. Rendahnya kredibilitas Disporapar dalam melaksanakan perannya sebagai fasilitator karena adanya ketidaksesuaian pengembangan Pantai Purwahamba Indah antara yang diharapkan dan direncanakan dengan kondisi di lapangan, membuat pemerintah kehilangan kepercayaan dari Pokdarwis dan PT BPK. Kurangnya kepercayaan Pokdarwis dan PT BPK terhadap Disporapar berdampak pada menurunnya hubungan atau interaksi, komitmen, pelaksanaan wewenang dan tanggungjawab, serta feedback untuk mencapai sinergitas antar stakeholder.

3. Rendahnya Responsivitas Disporapar

Feedback atau respon antar *stakeholder* dalam upaya mendorong terwujudnya sinergitas sangat dibutuhkan untuk menciptakan kesetaraan komunikasi tanpa adanya dominasi peran antar *stakeholder*. Peran Disporapar sebagai pelaksana komunikasi dan koordinasi dituntut untuk bersikap responsif sebagai pelayan publik untuk menjembatani aspirasi Pokdarwis dan PT BPK terkait dengan segala urusan dan kegiatan dalam upaya pengembangan wisata Pantai Purwahamba Indah. Namun, respon Disporapar kurang aktif dan konstruktif dalam koordinasi pembenahan inovasi sarana prasarana pengembangan Pantai Purwahamba Indah dan kegiatan promosi

wisata tidak sejalan dengan peran dari Disporapar baik bidang pariwisata maupun UPTD Pengelolaan Wisata Pantai Purwahamba Indah sebagai pelayan publik untuk senantiasa melakukan koordinasi terkait prasarana dan promosi wisata sebagaimana tertuang dalam Perbup No. 85 Tahun 2021.

4. Rendahnya Partisipasi atau Keterlibatan Stakeholder

Partisipasi didefinisikan oleh Astuti (2011:31) adalah bentuk keterlibatan individu atau kelompok dalam suatu kegiatan. Keterlibatan tersebut berupa keterlibatan fisik maupun mental dalam kegiatan yang mampu mendorong keberhasilan tujuan dan bertanggungjawab atas keterlibatannya. Dalam sinergitas *stakeholder* pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah, masih rendahnya partisipasi antar *stakeholder* dalam tanggungjawab akan perannya. Partisipasi Disporapar dan Pokdarwis masih rendah disebabkan karena keterlibatan pemerintah dan Pokdarwis yang kurang aktif dalam menjalankan perannya. Keterlibatan yang rendah juga mempengaruhi proses komunikasi dan koordinasi yang berdampak pada terhambatnya sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah.

KESIMPULAN

Sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah belum terwujud karena komunikasi untuk mencapai keberhasilan *output* pariwisata belum terlaksana dengan baik dan koordinasi yang belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kepercayaan antar *stakeholder* dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah menurun, keterbukaan informasi Disporapar masih belum terlaksana dengan baik, hubungan interpersonal antar *stakeholder* mulai merenggang, dan keberlanjutan koordinasi kegiatan antar *stakeholder* tidak berlangsung secara maksimal sehingga kondisi tersebut tidak sesuai dengan pengembangan wisata Pantai Purwahamba Indah sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Tegal No. 7 Tahun 2018. Hal tersebut dapat menghambat terwujudnya sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan objek wisata Pantai Purwahamba Indah.

SARAN

1. Perlu dilakukan peninjauan ulang dalam peningkatan kondisi sarana dan prasarana agar mencapai kebermanfaatan proses sinergitas sesuai dengan anggaran yang tersedia melalui komunikasi dan koordinasi yang melibatkan semua *stakeholder* sebagai media pendorong keberhasilan sinergitas.
2. Perlu ditingkatkan interaksi dan hubungan antar *stakeholder* secara transparan dan riil sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan untuk menciptakan keselarasan tindakan dan ucapan antara kondisi yang diharapkan dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Perlu dilakukan pembenahan dan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme Disporapar sebagai pelayan publik dalam melayani masyarakat melalui Pokdarwis dan PT BPK sebagai mitra kerja.
4. Perlu dilakukan peningkatan kesadaran antar *stakeholder* akan perannya dalam pengembangan Pantai Purwahamba Indah melalui kegiatan evaluasi yang masif. Selain itu, perlu didorong dengan menguatkan hubungan antar *stakeholder* dan menciptakan lingkungan kerja yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A. H. (2018). Etika Administrasi Publik: Peranan dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 1(2), 127–132. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>
- Astuti, R. S., Warsono, H., & Rachim, A. (2020). *Collaborative Governance: Dalam Perspektif Administrasi Publik* (Tim DAP Press (ed.); I). UNDIP Press.
- Azhari, A. K. (2017). Kolaborasi dan Kerja Sama Pengelolaan Obyek Wisata

- Alam: Kendala dan Prospeknya di Era Otonomi Daerah. *Journal of Tourism and Creativity*, 1(2), 121–140.
- Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di Kebun Raya Cibinong. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(2), 221–234. <https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v4i2.179>
- Covey, Stephen R. (2004). *The Seven Habits of Highly Effective People*. USA: Free Press. <https://icrrd.com/article/146/the-7-habits-of-highly-effective-people-powerful-lessons-in-personal-change>
- Devito, Joseph. (2016). *The Interpersonal Communication Book: 14th Edition*. Inggris: Pearson Education Limited. <https://slims.bakrie.ac.id/repository/f7d4f28f39e8b9d8cb794f6c4eb9cb0f.pdf>
- Hidayattuloh, M. H., Viantikasari, M., Bambang, A. N., & Amirudin. (2020). Potensi dan kendala pengembangan obyek wisata pantai Purwahamba Indah Kabupaten Tegal. *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(1), 99. <https://doi.org/10.20961/region.v15i1.27064>
- Irdyanti, & Pangestuti, A. (2020). Sinergitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu dengan The Caretaker Dalam Pengembangan Objek Wisata Suligi Hill. *Jurnal Trias Politika*, 4(1). <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i1.2490>
- Laksono, T. A. I. (2018). Persepsi Mahasiswa Komunikasi Tentang Pilihan pada Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Citra*, 5(1), 1–13. <http://jurnalcitra.id/index.php/JCN/article/view/2/2>
- Mangalou, S. (2022). Sinergitas Collaborative Governance Dalam Pencegahan dan Penanganan Pandemi Covid-19 Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 5(3), 575–590. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.11>
- Rakamdani. (2019). Sinergitas Aktor dalam Pengembangan Desa Wisata Okura di Kelurahan Tebing Tinggi Okura Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6, 1–16.
- Saleh, C. (2021). *Modul 01: Konsep, Pengertian, dan Tujuan Kolaborasi*. Universitas Terbuka. <https://pustaka.ut.ac.id>
- Sari, S. (2014). Meneropong Produksi Media dan Idealisme Media Dalam Keterbukaan Informasi. *Observasi*, 12(1), 11–26. <https://jurnal.kominfo.go.id/index.php/observasi/article/view/168/154>
- World Population Review. (2019). Negara Dengan Garis Terpanjang Di Dunia. <https://worldpopulation.com> Diakses pada tanggal 2 September 2022